

## Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

### *Evaluation of the Performance Accountability Report of Government Agencies at the Regional Office of Manpower and Transmigration of North Sulawesi Province*

**Yohanes Marselino Lenak, Christian Datu**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

[mmarselinolenak@gmail.com](mailto:mmarselinolenak@gmail.com); [itho.cd@gmail.com](mailto:itho.cd@gmail.com)

**Abstrak:** LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja instansi pemerintah kepada publik untuk menunjukkan seberapa jauh kinerja yang sudah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melalui pengukuran kinerja terhadap sasaran/program organisasi beserta realisasi keuangan yang ada pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwujudkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2021. Secara keseluruhan memiliki pencapaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian kinerja 100% dengan penggunaan anggaran yang rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah berhasil dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

**Kata Kunci:** Capaian Kinerja; Pengukuran Kinerja; Akuntabilitas Kinerja

**Abstract:** LAKIP is a form of accountability for the implementation of the performance of government agencies to the public to show how far the performance has been carried out. This study aims to determine the performance accountability of the Regional Office of Manpower and Transmigration of North Sulawesi Province by measuring performance against organizational goals/programs along with financial realization in the 2021 Government Agency Performance Report (LAKIP). The research method uses a qualitative research type with a descriptive approach. The results of the research show that the performance accountability of the Regional Office of Manpower and Transmigration of North Sulawesi Province is realized in the 2021 Performance Report. Overall it has very good performance achievements with a performance achievement score of 100% with low budget usage. Thus it can be concluded that for 2021, the Regional Office of Manpower and Transmigration of North Sulawesi Province can be said to have succeeded in achieving the targets set.

**Keywords:** Performance Achievement; Performance Measurement; Performance Accountability

---

## 1. PENDAHULUAN

Seluruh Instansi Pemerintah selalu berusaha dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* karena dengan terciptanya pengelolaan pemerintahan yang baik dapat membangun pemerintahan yang bersih dan menghasilkan pelayanan yang berkualitas baik bagi publik. Sehubungan dengan hal tersebut capaian kinerja instansi juga diperhatikan mengenai sejauh mana akuntabilitas kinerja dari perangkat daerah didalam mencapai suatu sasaran(global) untuk pembangunan pemerintahan yang baik demi kepentingan bersama.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik pemerintah wajib membuat laporan akuntabilitas Kinerja institusi pemerintahan sebagai bentuk akuntabilitas publik mengenai sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan itu sudah tercapai/sudah terlaksanakan. Kewajiban Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai langkah menuju *good governance* mengikuti ketentuan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sementara pelaporan berpedoman dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diterima: 27-05-2023; Disetujui untuk Publikasi: 28-06-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah termasuk instansi pemerintah daerah yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan melaporkan capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya suatu target dari sasaran/program yang disampaikan secara periodik pada setiap satu periode anggaran telah berakhir. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan program kerja yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021, adapun program yang dimaksud sebagai berikut Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Perencanaan Tenaga Kerja ; Program Penempatan Tenaga Kerja ; Program Hubungan Industrial ; Program Pengawasan Ketenagakerjaan; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ; Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan ; Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi ; Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi ; dan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Permasalahan organisasi pemerintah saat ini yaitu adanya pemahaman aparat pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dilihat dari penyerapan alokasi anggaran program/kegiatan dan belum tentu hal ini selaras dengan tujuan/sasaran. Kinerja dari instansi pemerintah mendapat perhatian publik dimana kinerja yang dihasilkan itu kurang optimal, masyarakat memiliki kesan kinerja yang dilaksanakan hanya berfokus pada jenis kegiatan yang dilakukan dan belum sepenuhnya memperhatikan capaian sasaran kinerja yang seharusnya dilakukan, jadi aparat pemerintah hanya mementingkan output dan belum memahami orientasinya untuk menghasilkan outcome. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya nilai dari instansi pemerintah atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang mendapat penilaian baik. Dari pandangan publik tersebut, maka pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dengan lebih memperhatikan kinerja yang dihasilkan dengan mempertimbangkan indikator hasil (*outcome*) terhadap suatu program yang dilaksanakan.

Untuk melihat sejauh mana capaian akuntabilitas kinerja Disnakertrans Daerah Provinsi Sulut dalam pencapaian pelaksanaan suatu program dan penggunaan anggaran, maka berdasarkan uraian yang telah disajikan diatas, penulis mengambil penelitian dengan judul “Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara”.

Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi keuangan yang relevan bagi pihak-pihak yang membutuhkan (Katikahadi dkk, 2016 : 3).

Menurut Mardiasmo (2018 : 18) Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Majid (2019 : 128) menyatakan, Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mempertanggung-jawabkan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah memberikan amanah.

Sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung-jawaban secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan dalam sektor pemerintahan. Selain itu, LAKIP merupakan alat pertanggungjawaban kinerja dari suatu institusi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya. Menurut PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014, LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Menurut Mahmudi (2019 : 45) penetapan pengukuran kinerja ialah untuk menilai kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai suatu target kinerja dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut PERMENPAN-RB No. 53 tahun 2014, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Mengacu pada Keputusan Kepala LAN No. 589/IX/6/Y/1999 yang telah disempurnakan dalam Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian, memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Pencapaian Kinerja \%} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Pencapaian Kinerja \%} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui nilai keberhasilan dari setiap sasaran/program kinerja instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja dikelompokkan dalam skala ordinal dengan 4 kategori yaitu :

- a) 85% s/d 100% : Sangat Berhasil (SB)
- b) 70% s/d 84% : Berhasil (B)
- c) 55% s/d 69% : Cukup Berhasil (CB)
- d) 0% s/d 54% : Tidak Berhasil (TB)

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai dalam proses penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2016 : 4). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu untuk mengidentifikasi kejadian berdasarkan fakta dan informasi di lapangan mengenai objek yang diteliti dengan mendeskripsikan dan menganalisis menggunakan teori yang ada yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut.

Tempat penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan berlokasi di Jl. 17 Agustus Nomor 69, Manado. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022.

### 2.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dipakai dalam proses penelitian ini memakai jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa data hasil wawancara dengan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengetahui informasi tentang laporan kinerja instansi pemerintah. Data kuantitatif berupa data hasil Pengukuran Kinerja dari Disnakertrans Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini termasuk data primer dan juga data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara dan observasi. Data sekunder, yaitu data yang sudah ada sebelumnya dan dipublikasikan dalam bentuk dokumen yang sudah jadi.

### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara, sbb:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung baik berupa tanya jawab formal maupun informal dengan pegawai Disnakertrans Prov. Sulut untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk proses penelitian.
  - 1) David A. K. Sopotan, SH (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)
  - 2) Elysabeth Koloay, SE, ME, Aj.Ak (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Disnakertrans)
2. Dokumentasi, yaitu berupa pengumpulan informasi dengan cara mempelajari dokumen, menganalisis dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen dapat berupa bentuk gambar, tulisan, atau karya yang dibuat dari seseorang.

### 2.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis data-data yang telah diperoleh, dimana data-data diolah dan diproses lebih lanjut untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang cukup jelas terhadap perumusan masalah yang dihadapi kemudian ditarik kesimpulan untuk memberikan saran bagi instansi.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

##### 3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum, Disnakertrans Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah bisa melaksanakan program kerja/kegiatan dengan sasaran strategis yang sebelumnya sudah direncanakan sebagaimana yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja tahunan (PK). Hal ini tercermin dari tercapainya keseluruhan sasaran strategis yang dirinci ke dalam 3 indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam tahun 2021. Sedangkan hasil pencapaian dari pengukuran tingkat indikator kinerja sasaran, mendasari pada hasil data Pengukuran Kinerja tahun 2021, yang diperlihatkan ditabel 1 dibawah, sbb.

**Tabel 1. Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,03	71,03
2	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	Presentase warga transmigrasi yang mandiri	100%	100%
		Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 lokasi	1 lokasi

Sumber: LAKIP Disnakertrans Provinsi Sulut Tahun 2021

Untuk memudahkan penafsiran atas pencapaian dari sasaran/program yang ditetapkan maka diberlakukan penilaian atas persentase pencapaian target dengan mengkategorikan capaian peringkatnya menurut persentase berikut ini:

**Tabel 2. Persentase Pencapaian Target**

No	Pencapaian Target (%)	Kategori Capaian Kerja
1	85 s/d 100	(SB) Sangat Berhasil
2	70 s/d 84	(B) Berhasil
3	55 s/d 69	(CB) Cukup Berhasil
4	0 s/d 54	(TB) Tidak Berhasil

Sumber: LAKIP Disnakertrans Provinsi Sulut Tahun 2021

Berdasarkan analisis hasil pencapaian kinerja dari sasaran satu dan sasaran dua, terkait sasaran strategis dinas yang terdapat pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 pada LAKIP yang diselenggarakan oleh Disnakertrans Daerah Provinsi Sulawesi Utara diperoleh hasil, seperti pada tabel yang berikut ini:

**Tabel 3. Analisis Hasil Pencapaian Terkait Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Ket.
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,03	71,03	100%	SB
	Presentase warga transmigrasi yang mandiri	100%	100%	100%	SB
2	Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	SB

Sumber: LAKIP Disnakertrans Provinsi Sulut Tahun 2021

##### 3.1.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara mengalami perubahan ditengah-tengah tahun sehingga mempengaruhi pagu anggaran awal karena anggaran *refocusing* untuk keperluan pandemi *Covid*. Dan dapat diakui bahwa terdapat program kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran sehingga anggarannya menjadi nol sebagai dampak dari adanya *refocusing*, anggaran yang semula digunakan untuk mendanai kegiatan untuk urusan ketenagakerjaan ataupun urusan ketransmigrasian sudah dilakukan realokasi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan penanggulangan *Covid-19*. Walaupun demikian, realisasi kinerja tahun 2021 mengenai fisiknya, semua tercapai, anggaran terpakai dan akuntabilitas kinerja dilaporkan dan diwujudkan dalam Laporan Kinerja tahun 2021.

Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Realisasi pada program Disnakertrans Prov. Sulut periode anggaran tahun 2021, ditunjukkan dibawah ini:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 4. Realisasi APBD pada Program Disnakertrans Prov. Sulut Tahun 2021**

Uraian Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Rp	%	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.727.626.367	1.713.454.674	99,18	14.171.693
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja	110.607.896	110.209.500	99,64	398.396
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	0	0	0,00	0
4. Program Hubungan Industrial	123.051.774	122.299.008	99,39	752.766
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan	119.394.093	119.022.000	99,69	372.093
6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	0	0	0,00	0
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	49.999.915	49.620.415	99,24	379.500
Jumlah	2.130.680.045	2.114.605.597	99,25	16.074.448

Sumber: Realisasi APBD Disnakertrans Prov. Sulut Tahun 2021 diolah

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

**Tabel 5. Realisasi APBN pada Program Disnakertrans Prov. Sulut Tahun 2021**

Uraian Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Rp	%	
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.675.755.000	2.662.400.100	99,50	13.354.900
2. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	453.921.000	452.740.805	99,74	1.180.195
3. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	357.060.000	356.381.586	99,81	678.414
Jumlah	3.486.736.000	3.471.522.491	99,57	15.213.509

Sumber: Realisasi APBN Disnakertrans Prov. Sulut Tahun 2021 diolah

Dari Tabel 4. dapat dilihat bahwa terdapat 2 program kegiatan Disnakertrans pada tahun 2021 yang memiliki nilai realisasi paling rendah yaitu pada Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Program Penempatan Tenaga Kerja. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran anggaran atau *refocusing* untuk dana *covid* sehingga target kinerja tidak tercapai.

### 3.2 Pembahasan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan target dalam dokumen penetapan kinerja tahunan telah mendapatkan perolehan keberhasilan dengan nilai capaian *outcome* yang ditunjukkan itu, indikator capaian mencapai nilai 100%. Dari hasil Evaluasi Kinerja Disnakertrans tahun 2021 dapat diketahui bahwa indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 71.03 atau tercapai 100% dari target angka IPK yaitu 71,03. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Disnakertrans Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat mencapai sasaran program dalam hal ini untuk urusan dibidang ketenagakerjaan.

Sedangkan capaian indikator kinerja untuk persentase warga transmigrasi yang mandiri sebesar 100% yaitu dari yang ditargetkan 4.747 Kepala Keluarga dapat tercapai sejumlah 4.747 Kepala Keluarga di 22 lokasi transmigrasi. Dan untuk indikator rencana pengembangan kawasan transmigrasi dari target awal ditetapkan sebanyak 1 lokasi dan untuk realisasi yang dihasilkan yaitu 1 lokasi di Kabupaten Bolsel sehingga capaian untuk indikator ini tercapai berjumlah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian untuk kedua indikator kinerja ini yaitu persentase warga transmigrasi yang mandiri dan rencana pengembangan kawasan transmigrasi telah sesuai target dengan sasaran strategis program yang merupakan urusan dibidang ketransmigrasian.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulut Tahun 2021 bahwa dari 10 program yang dijalankan dapat tercapai dengan baik dan terealisasi dengan rata-rata capaian 99% dengan kategori penilaian persentase capaian

Sangat Berhasil, hanya saja ada 2 program kegiatan yang tidak berhasil dikarenakan di masa pandemi anggarannya di *refocusing* sehingga kinerjanya pun ikut bekurang.

**Tabel 6. Klasifikasi Tingkat Pencapaian Program Kinerja Disnakertrans Prov. Sulut 2021**

No	Capaian Target	Program Disnakertrans	Realisasi (%)	Kategori
1.	85% - 100%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,18	Sangat Berhasil (SB)
		2. Program Perencanaan Tenaga Kerja	99,64	
		3. Program Hubungan Industrial	99,39	
		4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan	99,69	
		5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	99,24	
		6. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	99,50	
		7. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	99,74	
		8. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	99,81	
2.	70% - 84%	-	-	Berhasil (B)
3.	55% - 69%	-	-	Cukup Berhasil (CB)
4.	0% - 54%	1. Program Penempatan Tenaga Kerja	0,00	Tidak Berhasil (TB)
		2. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	0,00	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat pencapaian program kinerja diatas menyatakan secara umum realisasi program kegiatan Disnakertrans Provinsi Sulut tahun 2021 tercapai dengan jumlah 8 program kinerja berada di kriteria Sangat Berhasil kecuali yang kena *refocusing* yaitu program penempatan tenaga kerja dan program perencanaan kawasan transmigrasi itu tidak berhasil karena tidak ada anggaran untuk mencapai target program tersebut.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Secara umum kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 berupa sasaran strategis organisasi dan realisasi anggaran beserta capaiannya secara keseluruhan memperoleh nilai pencapaian kinerja yang baik, efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran dan tercapainya kinerja program. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dan dilaporkan berdasarkan LAKIP Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021, bahwa capaian untuk sasaran strategis organisasi dengan capaian kinerja yang terlihat itu 100%, berarti terlaksana dengan baik juga realisasi anggaran dengan nilai rata-rata 99% secara optimal terealisasi dengan baik. Dimana pencapaian kinerja dari sasaran strategis tercapai sesuai target dan pengelolaan keuangan menunjukkan capaian kinerja optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Kartikahadi, Hans., dkk. (2016). Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Cetakan 1. Gowa: Pusaka Almadia.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Jakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.